

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi



#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi tahun 2023. Secara umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan selama tahun 2023 serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi pada tahun 2023.

Jakarta, 30 Januari 2024 Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi



Anton Rahmadi, Ph.D.
NIP 19800401200501100

#### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Gambaran Umum	11
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	13
1. Struktur Organisasi	13
2. Tugas dan Fungsi	17
D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	36
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	37
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	43

#### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Matriks Kinerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 2023-2024	21
Tabel 3.1. Pengukuran Perjanjian Kinerja BPPT Tahun 2023	23

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi Pegawai BPPT berdasarkan status dan jenis kelamin	11
Gambar 1.2. Struktur Organisasi	14
Gambar 1.3. Fungsi BPPT	17
Gambar 1.4. Peran Strategis BPPT	18
Gambar 2.1. Visi dan Misi Kemendikbudristek 2020 – 2024	20
Gambar 3.1. Sasaran BPI Kemendikbudristek Jenjang Sarjana	24
Gambar 3.2. Sasaran BPI Kemendikbudristek Jenjang Magister	24
Gambar 3.3. Sasaran BPI Kemendikbudristek Jenjang Doktoral	25
Gambar 3.4. Sasaran BPI Kemendikbudristek Prioritas	25
Gambar 3.5. Metode Perhitungan Jumlah Mahasiswa yang Menerima BPI	26
Gambar 3.6. Metode Perhitungan Penilaian SAKIP	31
Gambar 3.7. Metode Perhitungan Penilaian NKA	33
Gambar 3.8. Nilai EKA pada aplikasi SMART	34
Gambar 3.9. Nilai IKPA pada aplikasi SPAN	34
Gambar 3 10, Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	36



#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan serta mempunyai tugas melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Layanan yang diberikan berupa fasilitasi Beasiswa Pendidikan Kebudayaan, Indonesia Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) yang merupakan program kolaborasi Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. **BPI** Kemendikbudristek terdiri dari program bergelar/degree dan non gelar/non degree.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 antara Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tolak ukur kinerja organisasi. Di dalam PK terdapat Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang harus dicapai selama tahun 2023. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 sasaran kegiatan, yaitu: (SK 1) Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi; dan (SK 2) Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

Atas kedua sasaran tersebut, ditetapkan dua (2) indikator kinerja kegiatan, yaitu: (IKK 1.1) Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia. (IKK 2.2) Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan, BPPT mendapatkan total alokasi anggaran awal sebesar Rp 12.600.000.000 sebagaimana tercantum pada DIPA yang terbit pada tanggal 31 Maret 2023. Dari anggaran tersebut, terdapat blokir senilai Rp 3.332.184.000. Seiring berjalannya waktu, dilakukan revisi terhadap blokir untuk direalokasi ke satker lain yang memerlukan tambahan anggaran bersifat penting dan mendesak. Pada revisi terakhir DIPA tahun 2023, total alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi adalah sebesar Rp.9.267.816.000. Atas alokasi anggaran tersebut, pada akhir tahun 2023 tercatat dapat direalisasikan sebesar Rp 9.127.136.498 atau 98.48% dari total alokasi anggaran.

Tingkat ketercapaian Sasaran dan Indikator Kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Penerima BPI berdasarkan Total

IKK Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.

IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.



Sekalipun secara target (IKK 1.1) Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia telah tercapai, masih terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan pencapaian target kinerja, yaitu:

- 1) Periode pendaftaran ulang di berbagai Perguruan Tinggi beragam.
- 2) Masih terdapatnya upaya dari pendaftar untuk melampirkan dokumen yang tidak sesuai.
- 3) Verifikasi pembayaran bertahap pada Kemendikbud dan Kemenkeu mengakibatkan jangka waktu pengajuan sampai dengan pencairan relatif lebih lama.

(IKK 2.2) Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi belum mencapai target disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut:

- (1) Nilai kinerja anggaran belum mendapatkan kategori sangat baik dikarenakan nilai pada tiga komponen yakni deviasi lampiran tiga, ketepatan waktu penyelesaian SPJ lengkap, dan serapan anggaran terhadap perencanaan.
- (2) Efisiensi penggunaan anggaran masih dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan nilai kinerja anggaran yang lebih baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul adalah sebagai berikut:

- (1) Memastikan perencanaan penganggaran dengan melakukan optimasi pada empat komponen yakni: deviasi lampiran tiga, ketepatan waktu penyelesaian SPJ lengkap, serapan anggaran terhadap perencanaan dan efisiensi penggunaan anggaran.
- (2) Menjaga kinerja pencapaian (IKK 1.1) Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.
- (3) Menyesuaikan periode seleksi dengan mayoritas periode daftar ulang di Perguruan Tinggi dan melakukan sinkronisasi data dengan Perguruan Tinggi untuk memvalidasi kebenaran data akademik yang disampaikan pendaftar. untuk mengoptimalkan IKK 1.1.
- (4) Melakukan monitoring terhadap pengajuan dana yang telah disampaikan ke Kemenkeu (LPDP).

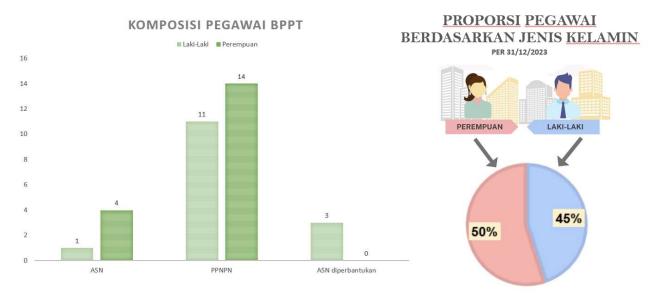


### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) dibentuk melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPPT adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan serta mempunyai tugas melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Layanan yang diberikan berupa fasilitasi Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) yang merupakan program kolaborasi Kemendikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. BPI Kemendikbudristek terdiri dari program bergelar/degree dan non gelar/non degree.

Untuk menjalankan fungsinya, BPPT dipimpin oleh Kepala Balai yang diangkat pada 25 Oktober 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 27390/S/06/2022. Pelaksanaan fungsi oleh Kepala Balai didukung oleh tim yang terdiri dari sumber daya manusia yang handal dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 1.1. Komposisi Pegawai BPPT berdasarkan status dan jenis kelamin.

Laporan Kinerja Tahun 2023

#### B. Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan BPI Kemendikbudristek oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi:

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Per-21/LPDP/2023 tentang Standar Biaya Beasiswa Degree Program Kolaborasi Dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- Perjanjian Kerjasama antara LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PRJ-11/LPDP/2023 dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 04/III/PKS/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023;
- 4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2023 tentang Petunjuk Pengelolaan Program Beasiswa Bergelar/Degree Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;dan
- Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 tahun 2023 tentang Pengelolaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
   Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata
   Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

- 5. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020-2024 Revisi Tahun 2022;
- 6. Rencana Strategis Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 2023-2024;

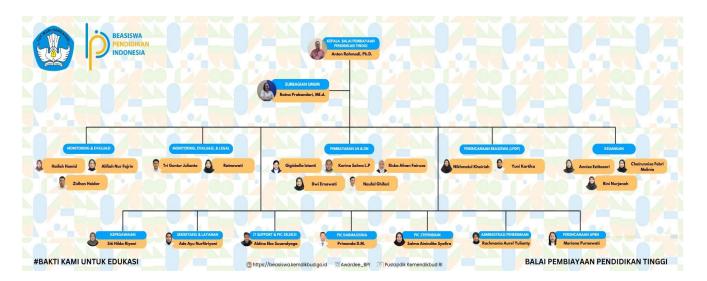
#### C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

#### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagaimana terdiri atas Kepala; Subbagian Umum; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Untuk menjalankan tugasnya, selama tahun 2023 Kepala dan Kasubbag Umum BPPT didukung oleh 3 Pegawai Negeri Sipil dan 19 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang melakukan pelayanan terhadap 9.951 mahasiswa penerima BPI. Masing-masing menjalankan fungsi, baik yang berkaitan dengan beasiswa maupun operasional Balai pada umumnya. Pegawai dan kategori pekerjaan yang dilakukan terangkum dalam gambar berikut:



Gambar 1.2. Struktur Organisasi BPPT

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi diisi oleh pejabat administrator atau struktural eselon III dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan;
- b) mengkoordinasikan kegiatan pengembangan program;
- c) melaksanakan inovasi pengembangan program;
- d) melaksanakan pengelolaan sistem informasi;
- e) bekerja sama dengan satuan kerja terkait, melaksanakan program;
- f) melaksanakan fasilitasi program/kegiatan;
- g) melaksanakan urusan administrasi;
- h) melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan;
- i) melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BPPT;
- j) melaksanakan pendayagunaan sarana dan prasarana serta fasilitas di lingkungan BPPT;
- k) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan;
- 1) menyusun laporan program dan kegiatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

#### a. Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum diisi oleh pejabat pengawas atau struktural eselon IV dan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program;
- b) melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran;
- c) melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran;
- d) melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
- e) melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f) melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- g) melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai;
- h) melakukan urusan penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, dan pemindahan pegawai serta mutasi lainnya;
- i) melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai;
- j) melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya;
- k) melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- l) melakukan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- m) melakukan penyiapan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, izin belajar, dan tugas belajar;
- n) melakukan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;
- o) melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja;
- p) melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja,

- danstandar pelayanan;
- q) melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- r) melakukan urusan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip;
- s) melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- t) melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas utama dan pendukung;
- u) melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
- v) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
- w) melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas,dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya;
- x) melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- y) melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara;
- z) melakukan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara;
- aa) melakukan urusan penyusunan laporan keuangan;
- bb) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen; dan
- cc) melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan.

#### b. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional BPPT saat ini terdiri dari satu (1) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja BPI (Beasiswa Pendidikan Indonesia) yang memiliki tugas:

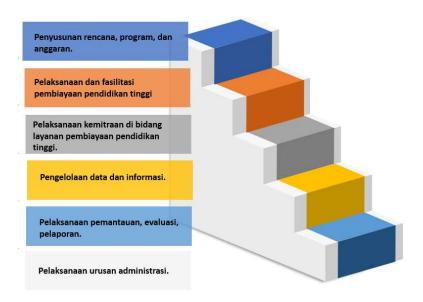
- 1) Menyusun rencana program beasiswa;
- 2) Menyusun pedoman pendaftaran dan pedoman lain terkait pelaksanaan beasiswa;
- 3) Menyiapkan sistem pendaftaran dan seleksi, pencairan dan sistem monitoring dan evaluasi;

- 4) Melaksanakan pendaftaran, seleksi dan penetapan penerima beasiswa;
- 5) Mengusulkan pencairan dana beasiswa;
- 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### 2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, tugas BPPT adalah melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Sedangkan tugas BPPT adalah sebagai berikut:

### Fungsi BPPT



Gambar 1.3. Fungsi BPPT

#### D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Pada tahun 2023, terdapat isu strategis yang mempengaruhi kinerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi antara lain:

 Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi melalui pemberian Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek). 2. Mengubah cara berpikir penerima beasiswa bahwa beasiswa yang diberikan merupakan stimulus untuk mengembangkan potensi akademik dan non akademik yang dimiliki.

## **Peran Strategis**



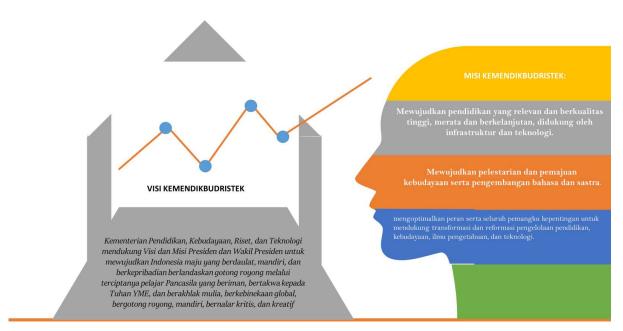
Gambar 1.4. Peran Strategis BPPT



#### **BAB II**

#### PERENCANAAN KINERJA

Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mendukung sepenuhnya visi dan misi Kemendikbudristek 2020 – 2024, yaitu:



Gambar 2.1. Visi dan Misi Kemendikbudristek 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) 2023-2024 berfokus pada meningkatkan mutu dan perluasan akses pendidikan tinggi. Hal tersebut diwujudkan dalam program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) yang dilaksanakan oleh BPPT. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2023 tentang Petunjuk Pengelolaan Program Beasiswa Bergelar/Degree Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, BPI Kemendikbudristek adalah adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga

Pengelola Dana Pendidikan. Beasiswa tersebut diberikan untuk meningkatkan kualifikasi melalui pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, dalam menjalankan tugasnya, BPPT menetapkan sasaran, indikator, dan target selama periode 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Kinerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 2023-2024

Kode	Sasaran Kegiatan (SK) /	Satuan	Target		
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		2022	2023	2024
SK	Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi				
IKK	Jumlah mahasiswa yang menerimaBeasiswa Pendidikan Indonesia.	Orang	-	9.316	12.345
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.				
IKK	Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB.	Predikat	-	-	A
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	Nilai	-	88	90

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2024, BPPT merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPPT dengan Sekretaris Jenderal sebagai berikut:

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiat <mark>a</mark> n	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 1.1] Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	9.316
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	88



# **BAB III**

# AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2023

2023

https://beasiswa.kemdikbud.go.id

#### BAB III

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### A. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023, BPPT menetapkan 2 sasaran kegiatan diturunkan menjadi 3 Indikator Kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Perjanjian Kinerja BPPT Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi.	Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	9.316	9.951	106.8 %
Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.	Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB.	-	-	-
Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.	88	87.61	99.6 %

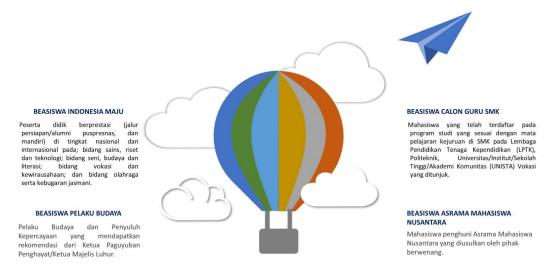
# Sasaran Kinerja 1: Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi.

Untuk Capaian Sasaran Kinerja 1 diturunkan menjadi 1 indikator kinerja yaitu Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.

#### a. Definisi Operasional

Ruang lingkup mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia meliputi mahasiswa yang telah diterima pada periode sebelumya dan masih menempuh pendidikan (*ongoing*) serta mahasiswa baru yang ditetapkan di periode seleksi tahun 2023. Adapun untuk skema program yang dilayani di tahun 2023 terangkum dalam gambar berikut:

## Sasaran BPI – Jenjang Sarjana (S1)



Gambar 3.1. Sasaran BPI Kemendikbudristek Jenjang Sarjana

### Sasaran BPI – Jenjang Magister (S2)



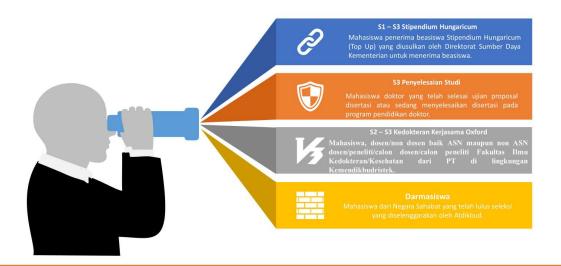
Gambar 3.2. Sasaran BPI Kemendikbudristek Jenjang Magister

### Sasaran BPI – Jenjang Doktoral (S3)



Gambar 3.3. Sasaran BPI Kemendikbudristek Jenjang Doktoral

### Sasaran BPI - Prioritas



Gambar 3.4. Sasaran BPI Kemendikbudristek Prioritas

#### b. Metode Perhitungan

Dalam definisi operasional yang tercantum dalam renstra BPPT tahun 2023-2024, perhitungan jumlah mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:



Jumlah Penerima Beasiswa S1 Calon Guru SMK + S1 Pelaku Budaya + S1 Beasiswa Indonesia Maju + S1 Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara + S1 Stipendium Hungaricum + S2 Pendidikan PTA + S2 Pendidikan Vokasi + S2 Pelaku Budaya + S2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan + S2 Beasiswa Indonesia Maju + S2 Stipendium Hungaricum + S3 Pendidikan PTA + S3 Pendidikan PTV + S3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan + S3 Dosen LPTK/Pendidikan Profesi Guru + S3 Pelaku Budaya + S3 Beasiswa University of Oxford + S3 Stipendium Hungaricum + S3 Penyelesaian Studi (Bantuan Disertasi) + Dharmasiswa (Non gelar)

Gambar 3.5. Metode Perhitungan Jumlah Mahasiswa yang Menerima BPI

#### c. Perbandingan Target dan Capaian IKK

Pada tahun anggaran 2023, target kinerja IKK Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia tercapai sebesar 106,82%. Dari target yang ditentukan pada awal tahun yaitu 9.316 mahasiswa, telah tercalisasikan menjadi 9.951 mahasiswa yang dilayani sampai dengan akhir tahun.

#### d. Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan untuk mensukseskan tercapainya IKK.ini. Sepanjang tahun 2023, kegiatan pendukung yang telah terselenggara yaitu:

1) pembukaan akun pendaftaran yang ditandai dengan webinar berkolaborasi melalui kanal yang memiliki 65.700.000 subscriber yaitu youtube Pusat Layanan

- Pembiayaan Pendidikan (@PuslapdikKemendikbudRI) sehingga lebih banyak sasaran yang terjangkau.
- 2) Sosialisasi program ke beberapa Perguruan Tinggi, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Contohnya Universitas Cenderawasih Papua, Universitas Mulawarman Kalimantan, dan Universitas Trunojoyo Madura.
- 3) Publikasi melalui media sosial Instagram yaitu melalui postingan dan siaran langsung berkolaborasi dengan pemengaruh serta perwakilan Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.





Laporan Kinerja Tahun 2023









- e. Analisis Faktor Pendukung Kesuksesan Pencapaian Target Keberhasilan capaian ini diantaranya didukung oleh:
  - 1) Sosialisasi yang masif mampu mencapai lebih banyak sasaran sehingga lebih banyak target yang mengetahui BPI Kemendikbudristek.
  - 2) Pengawasan pada capaian target yang lebih baik, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi berikutnya.
  - 3) Adanya kolaborasi/kerja sama dengan Perguruan Tinggi sehingga lebih banyak dosen/tenaga kependidikan yang mengetahui mengenai BPI.

4) Monitoring terhadap capaian target RO secara rutin dilakukan sehingga dapat dilakukan langkah penyesuaian yaitu pembukaan seleksi *batch 2* ketika terdapat sisa kuota yang belum tercapai pada RO Mahasiswa yang menerima BPI.

#### f. Analisis hambatan yang dihadapi dan langkah antisipasi

- Periode pendaftaran ulang di berbagai Perguruan Tinggi beragam. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah menyesuaikan periode seleksi dengan mayoritas periode daftar ulang di Perguruan Tinggi.
- 2) Masih terdapatnya upaya dari pendaftar untuk melampirkan dokumen yang tidak sesuai. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan sinkronisasi data dengan Perguruan Tinggi untuk memvalidasi kebenaran data akademik yang disampaikan pendaftar.
- 3) Verifikasi pembayaran bertahap pada Kemendikbudristek dan Kemenkeu mengakibatkan jangka waktu pengajuan sampai dengan pencairan keuangan relatif lebih lama. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap pengajuan dana yang telah disampaikan ke Kemenkeu (LPDP).

#### g. Strategi dalam pencapaian kinerja

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target kinerja dengan kualitas kinerja yang lebih baik diantaranya:

- 1) Penjadwalan seleksi selaras dengan kalender akademik sehingga memberi kesempatan lebih banyak kepada calon peserta yang akan mengikuti seleksi.
- 2) Pelaksanaan sinkronisasi dan validasi data dengan perguruan tinggi yang lebih akurat untuk mencegah potensi ketidaksesuaian data akademik bertentangan dengan peraturan/petunjuk teknis.
- 3) Pengawasan internal yang lebih baik untuk memantau perkembangan pelaksanaan program.

# Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

Untuk capaian sasaran kinerja 2 terbagi menjadi dua (2) indikator kinerja kegiatan, yaitu:

- a. Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal A
  - 1) Definisi Operasional

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Permendikbudristek 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kemendikbudristek, menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Menurut Perpres 29 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan:

- a) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; adalah unit instansi pemerintah pusat selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
- b) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; adalah instansi pemerintah pusat yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon I.
- c) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/ Lembaga; adalah unit kerja kementerian negara/ lembaga yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat kementerian negara/ Lembaga. Penyelenggaraan SAKIP mencakup: Rencana Strategis; Perjanjian

Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

#### 2) Metode Perhitungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, metode perhitungan nilai SAKIP dihitung dengan cara sebagai berikut:



Gambar 3.6. Metode Perhitungan Penilaian SAKIP

#### 3) Perbandingan Target dan Capaian IKK

Pada tahun 2023, SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi belum dilakukan penilaian. Meskipun demikian, telah terdapat kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan pencapaian target pada periode selanjutnya.

#### 4) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan pencapaian target pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Telah disusunnya dokumen perencanaan kinerja (Rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi).
- Telah dilakukannya pelaporan kinerja (pengukuran kinerja pada triwulan III dan IV, laporan kinerja tahun 2023)
- c. Mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP Tingkat dasar untuk memperoleh pengetahuan dan pedoman dalam mengoptimalkan pencapaian target.
- d. Mengikuti sosialisasi Penyusunan Reviu Renstra dan Penyusunan Kinerja yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan.
- 5) Analisis Faktor Pendukung Kesuksesan Pencapaian Target.

Kegiatan didukung oleh adanya komunikasi yang baik dengan unit terkait (Biro Perencanaan dan Puslapdik) sehingga penyusunan dan evaluasi kegiatan dalam rangka mencapai predikat SAKIP tahun berikutnya dapat terlaksana dengan baik.

6) Analisis hambatan yang dihadapi dan langkah antisipasi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target SAKIP tidak lepas dari adanya hambatan, yaitu:

- a. Penyusunan Rencana Strategis baru dapat dilakukan pada Agustus 2023 atau lima bulan setelah DIPA terbit. Langkah antisipasi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Puslapdik untuk penyusunan Renstra dan menetapkan matriks kinerja.
- b. Penyusunan Reviu Renstra di aplikasi SPASIKITA tidak dapat dilakukan tepat waktu karena terdapat kolom target renstra yang belum diisi. Langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan tim Biro Perencanaan untuk dapat mengisi target renstra 2023 dan 2024 sesuai dengan yang telah ditetapkan.

#### 7) Strategi dalam pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja untuk predikat SAKIP untuk tahun selanjutnya. BPPT melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan maupun

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) untuk melakukan reviu dan menyusun strategi.

#### b. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

#### 1) Definisi Operasional

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

#### 2) Metode Perhitungan

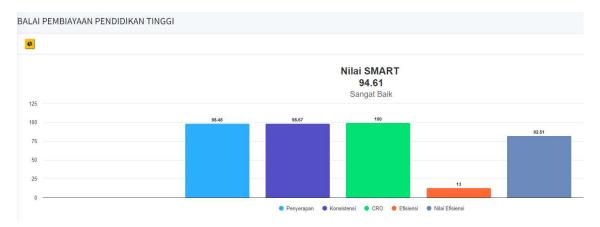
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, metode perhitungan nilai SAKIP dihitung dengan cara sebagai berikut:



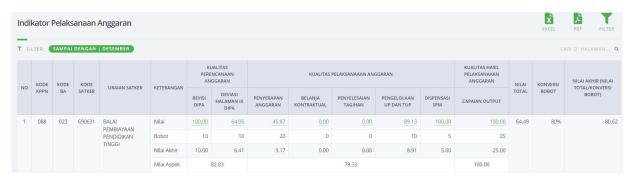
Gambar 3.7. Metode Perhitungan Penilaian NKA

#### 3) Perbandingan Target dan Capaian IKK

Pada tahun anggaran 2023, target kinerja untuk Nilai Kinerja Anggaran sebesar 88. Berdasarkan hasil pengukuran EKA dan IKPA pada aplikasi pengelolaan dan pelaporan APBN yaitu SAKTI, SMART, SPAN, dan SPASIKITA, maka didapatkan perolehan nilai sebagai berikut:



Gambar 3.8. Nilai EKA pada aplikasi SMART



Gambar 3.9. Nilai IKPA pada aplikasi SPAN

- 4) Analisis Program dan Kegiatan Pendukung.
  - a) Capaian output secara berkala sesuai waktu yang ditentukan.
  - b) Melakukan revisi halaman III DIPA untuk periode yang telah berlalu agar mengoptimalkan komponen nilai konsistensi RPD.
  - c) Melakukan evaluasi secara berkala terkait capaian Triwulanan.
- 5) Analisis Faktor Pendukung Kesuksesan Pencapaian Target.
  - a) Capaian output penerima Beasiswa melebihi dari target yang telah ditetapkan tanpa melakukan penambahan anggaran sehingga terdapat efisiensi yang cukup baik pada penilaian EKA.
  - b) Capaian output RO Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia dan RO Layanan Perkantoran melebihi target yang ditentukan

- sehingga nilai capaian output baik pada IKPA maupun EKA dapat mencapai 100%.
- c) Monitoring terhadap capaian target RO secara rutin dilakukan sehingga dapat dilakukan langkah penyesuaian yaitu pembukaan seleksi batch 2 ketika terdapat sisa kuota yang belum tercapai pada RO Mahasiswa yang menerima BPI.
- 6) Analisis hambatan yang dihadapi dan langkah antisipasi.
  - Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa hambatan yang kemudian dapat diselesaikan melalui upaya aktif yang dilakukan oleh BPPT. Adapun hambatan yang ditemui di antaranya adalah:
  - a) Nilai Deviasi Hal III DIPA (Rencana Penarikan Dana) belum disusun sesuai dengan rencana actual kegiatan dan pertanggungjawabannya. Langkah antisipasi yang dilakukan: Melakukan penyesuaian RPD setiap awal triwulan untuk dapat mengoptimalkan nilai EKA.
  - b) Penyerapan anggaran pada triwulan I tidak dapat dilakukan karena BPPT merupakan satker baru dan terbit DIPA di 31 Maret 2023. Aktual penyerapan baru dapat dilakukan di akhir April 2023. Langkah antisipasi yang dilakukan: Mempercepat penyerapan anggaran sehingga dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
  - c) Penyerapan anggaran pada triwulan II tidak dapat mencapai target karena penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan mayoritas di triwulan III. Langkah antisipasi yang dilakukan: Mempercepat penyerapan anggaran sehingga dapat mengoptimalkan serapan anggaran sampai pada triwulan IV.
- 7) Strategi dalam pencapaian kinerja.
  - a) Memastikan setiap indikator yang menjadi penilaian dapat dilaksanakan dengan baik.
  - b) Memastikan pelaksanaan indikator tersebut juga dilaporkan di sistem (aplikasi) yang telah disediakan.

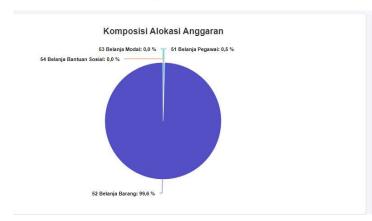
#### B. Realisasi Anggaran

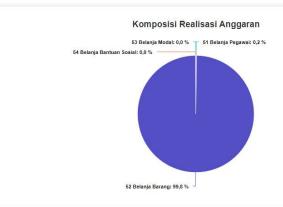
#### Capaian Anggaran

PAGU Anggaran BPPT dalam DIPA awal tahun 2023 yang terbit pada 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 12.600.000.000 dengan blokir sejumlah Rp 3.332.184.000 Seiring dengan adanya perubahan dan kebijakan, BPPT melakukan realokasi anggaran yang diblokir ke satuan kerja lain. Pada DIPA akhir yang disahkan pada 27 Desember 2023 (revisi 7), PAGU Anggaran BPPT adalah sebesar Rp 9.267.816.000. Sampai dengan 31 Desember 2023, serapan anggaran mencapai 98.48% dari total PAGU atau sebesar Rp 9.127.136.498.

Akun 2 Digit Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Persentase 51 Belanja Pegawai 41.790.000 16.026.265 38.35 % 52 Belanja Barang 9.226.026.000 9.111.110.233 98.75% 53 Belanja Modal 0 nan % 57 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0.00 %

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran





Gambar 3.10. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

#### 2. Efisiensi Anggaran

Selama tahun anggaran 2023, BPPT telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 13% dari Total PAGU Tahun 2023 atau senilai Rp 1.205.009.503. Hasil efisiensi tersebut merupakan penghematan dari beberapa program yang telah tuntas dilaksanakan namun masih terdapat sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang lain.

Laporan Kinerja Tahun 2023

#### C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

#### 1. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh BPPT selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pada aplikasi monitoring dan evaluasi (<a href="https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/login">https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/login</a>) berupa penambahan jendela admin yang dapat digunakan oleh pengelola BPI Kemendikbudristek di setiap perguruan tinggi untuk memperbarui data akademik penerima BPI Kemendikbudristek.
- b. Migrasi data penerima hasil seleksi tahun 2021 dari aplikasi monev yang lama ke aplikasi monev yang terintegrasi untuk semua angkatan.
- c. Otomatisasi pengajuan dana tunjangan buku yang semula harus diajukan setiap tahun oleh penerima menjadi pengajuan otomatis setiap tahun setelah laporan perkembangan studi diterima oleh verifikator monev.
- d. Penguncian Laporan Perkembangan Studi setiap 3 bulan untuk meminimalisir pengajuan yang tidak sesuai ketentuan dan memudahkan dalam pembayaran biaya hidup bulanan.
- e. Penambahan fitur penarikan formulir pengajuan pembayaran (F4) melalui aplikasi monev sehingga tidak perlu dilakukan secara manual kembali.

# 2. Program Crosscutting/Collaborative

No	Program	Definisi Program	IKK terkait	Dampak Program
1.	Pathway Program Dosen LPTK	Pathway Program merupakan program persiapan studi yang dikhususkan bagi Dosen yang mengajar di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan kemampuan Bahasa dan penulisan dokumen ilmiah sebagai persiapan menjalankan studi luar negeri.	1.1. Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Meningkatkan jumlah penerima beasiswa BPI skema S3 Dosen LPTK di tahun N+1.
2.	Beasiswa Non Gelar – Darmasiswa.	Darmasiswa adalah program Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara asing dari negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik untuk belajar bahasa, seni, dan kebudayaan Indonesia pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia.	1.1. Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Sebagai alat diplomasi lunak dengan negara- negara sahabat.
3.	Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara.	Asrama Mahasiswa Nusantara adalah satu program yang dicanangkan Presiden RI sebagai wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, Bahasa, Kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai Perguruan Tinggi.	1.1. Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Pembinaan merekatkan anak bangsa dan meningkatkan nasionalisme sesuai dengan Perpres no 106 Tahun 2021 tentang AMN.
4.	Beasiswa Indonesia Maju – Persiapan.	Beasiswa Indonesia Maju adalah Beasiswa Bergelar yang diperuntukan kepada Peserta Didik berprestasi dari ajang dan non ajang talenta.	1.1. Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Memenuhi kebutuhan SDM Indonesia masa depan berdaya saing internasional sesuai dengan RPJMN.
5.	Coaching Reviewer Seleksi BPI.	Merupakan kegiatan penyamaan persepsi di antara para reviewer seleksi BPI Kemendikbudristek untuk mendapatkan standar dan kriteria yang sama sebelum melaksanakan seleksi substansi.	1.1. Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Mendapatkan persamaan persepsi reviewer sehingga proses seleksi BPI dilakukan dengan standar yang sama.
6.	Penyaluran Beasiswa	Merupakan kolaborasi berupa verifikasi keuangan bertahap di Kemendikbudristek dan Kemenkeu (LPDP) terhadap pengajuan dana yang disampaikan oleh penerima beasiswa.	1.1. Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	Menjaga mutu dan ketepatan waktu penyaluran beasiswa bersama-sama dengan LPDP.

No	Program	Unit Terkait	Peran BPPT
1.	Pathway Program Dosen LPTK	USAID Teman LPDP, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan	<ul> <li>Melakukan seleksi, sosialisasi, pembinaan, dan monitoring program.</li> <li>Mempersiapkan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan program.</li> </ul>
2.	Beasiswa Non Gelar – Darmasiswa untuk Mahasiswa Asing yang mempelajari Seni dan Budaya di Indonesia.	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian, Perguruan Tinggi, Bank, Biro Hukum	<ul> <li>Mempersiapkan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan program.</li> <li>Berkolaborasi dengan BKHM untuk melakukan monitoring dan evaluasi.</li> <li>Berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk percepatan pengajuan pembayaran.</li> </ul>
3.	Beasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara	Dit. Belmawa	Melakukan pembinaan dan monitoring program.
4.	Beasiswa Indonesia Maju - Persiapan	Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas)	<ul> <li>Menetapkan penerima berdasarkan hasil seleksi oleh Puspresnas.</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima program.</li> <li>Melakukan pengajuan pembayaran beasiswa.</li> </ul>
5.	Coaching Reviewer Seleksi BPI	Pengurus Pusat HIMPSI, Reviewer dari latar belakang akademisi, psikolog, dan professional.	<ul> <li>Mempersiapkan peraturan dan instrumen penilaian seleksi wawancara.</li> <li>Memfasilitasi pelaksanaan simulasi seleksi wawancara.</li> </ul>
6.	Penyaluran Beasiswa	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Melakukan verifikasi dan pengajuan pembayaran terhadap komponen dana yang harus disalurkan ke penerima beasiswa.

Program kolaborasi antara BPPT dengan LPDP dipayungi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendikbudristek dengan LPDP yang diperbarui setiap tahun. Untuk tahun 2023, kutipan PKS tercantum dalam gambar berikut:





#### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### ANTARA

#### LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### DAN

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

#### TENTANG

# PROGRAM PENDANAAN BEASISWA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

NOMOR: PRJ-11 /LPDP/2023 NOMOR: 04/III/PKS/2023

Pada hari ini tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03-2023), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	ANDIN	: Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga					
	HADIYANTO	Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dalam hal ini					
		bertindak untuk dan atas nama LPDP, yang					
		berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya					
	No. 91 A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanju						
		sebagai PIHAK KESATU.					

II. SUHARTI : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini



# BAB IV PENUTUP

Pada tahun anggaran 2023, Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) sudah memenuhi target sesuai yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang terdiri dari lima (2) Sasaran Kegiatan (SK). Capaian dari masing-masing SK tersebut adalah sebagai berikut:

- Capaian Sasaran Kegiatan tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi. didukung oleh satu IKK yaitu Jumlah Mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia yang terealisasi sebesar 106.82%.
- 2. Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi didukung oleh 2 (dua) IKK. IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB belum dilakukan penilaian pada tahun 2023 karena DIPA awal baru terbit di 31 Maret 2023.; IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal 88, untuk IKK ini mendapat Nilai 87,61.

Dalam hal penyerapan anggaran, BPPT mencapai serapan sebesar Rp Rp 9.127.136.498 atau 98,48% dari alokasi anggaran berdasarkan DIPA Revisi terakhir sebesar Rp 9.267.816.000.

Keberhasilan yang dicapai selama tahun 2023 antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran staf di BPPT yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPPT. Beberapa kendala dapat diatasi bersama karena adanya koordinasi antar bagian yang semakin terbangun dengan baik.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya pencapaian target-target yang ditetapkan.
- 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit utama di lingkungan Kemendikbudristek, maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kemendikbudristek.
- 3. Pengembangan sistem aplikasi yang mendukung tugas dan fungsi BPPT.

# **LAMPIRAN**

# Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2023

Ketua Tim Reviu

Ratna Prabandari

NIP. 19800205200312003



# Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dengan Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anton Rahmadi, Ph.D

Jabatan : Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan: Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta,05 Juli 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi,



Suharti





# **Target Kinerja**

#	Sasaran Kegiatan	egiatan Indikator Kinerja Kegiatan	
1	[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 1.1] Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	9.316
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	88

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	
1	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 5.600.000.000	
2	4469 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi		Rp. 7.000.000.000	
		TOTAL	Rp. 12.600.000.000	

Jakarta,05 Juli 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi,



Suharti





# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

## 1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 1.1] Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	orang	9316	<b>TW3</b> : 6574	TW3: 6574
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB	Predikat	0	<b>TW3:</b> 0	<b>TW3</b> : 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Nilai	88	<b>TW3</b> : 0	<b>TW3 :</b> 71,56

# 2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III

#### a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.11.586.400.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Oktober 2023 sebesar **Rp. 5.152.963.341** atau **44.47%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 31 Oktober 2023 **Rp. 6.433.436.659** 

## b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

# A . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

- IKK 1.1 Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.

# **Progress / Kegiatan:**

Pelayanan terhadap mahasiswa yang dilayani telah berjalan sejak Januari 2023, terdiri dari mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru hasil seleksi BPI tahun 2023 tujuan perguruan tinggi Luar Negeri maupun Dalam Negeri. Hasil seleksi dalam negeri ditetapkan di akhir September.

# Kendala / Permasalahan :

Berdasarkan hasil seleksi Batch I baik tujuan tujuan luar negeri maupun dalam negeri, masih terdapat potensi untuk menambah jumlah penerima beasiswa Angkatan tahun 2023, sekitar 500 orang. Selain itu juga terdapat program baru yang akan diintroduksikan di TW IV Tahun 2023, yakni bantuan disertasi. Program Bantuan Disertasi memerlukan Kerjasama pertukaran data dengan DRTPM Diktiristek agar tidak terjadi double funding, khususnya di program Penelitian Disertasi Doktor.

# Strategi / Tindak Lanjut:

Pertama, melakukan pembukaan batch 2 untuk mengoptimalkan pagu anggaran yang telah diberikan. Kedua, melaksanakan program pendaftaran bantuan disertasi, dan berkoordinasi dengan DRTPM Diktiristek untuk pertukaran data penerima Hibah Penelitian Disertasi Doktor.

# B . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB

# **Progress / Kegiatan :**

Perjanjian Kinerja telah disusun setelah Rencana Strategis ditetapkan dan diproses di aplikasi SPASIKITA.

# Kendala / Permasalahan:

Terdapat kendala pada saat penyusunan Rencana Aksi sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kinerja di aplikasi SPASIKITA.

# Strategi / Tindak Lanjut:

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk mendapatkan arahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

# C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

# **Progress / Kegiatan:**

Serapan anggaran sampai dengan akhir TW III adalah sebesar 34% atau sebesar Rp 3.920.899.494 dari total PAGU anggaran senilai Rp



11.586.400.000.

#### **Kendala / Permasalahan:**

Persentase pencairan anggaran masih rendah sehingga menyebabkan nilai NKA kecil, hal ini dikarenakan masih ada pagu anggaran yang di blokir. Nilai IKPA belum maksimal karena beberapa komponen tidak mencapai nilai maksimal, yaitu untuk serapan anggaran, deviasi hal III, dan pengelolaan UP TUP. Serapan anggaran dan deviasi hal III belum maksimal karena jadwal kegiatan mundur sehingga tidak sesuai dengan rencana penarikan yang telah direncanakan. Selain itu, terdapat anggaran yang belum dapat diserap yaitu untuk anggaran gaji tunjangan PNS mengingat PNS yang ditugaskan di BPPT masih dilakukan penggajian di satker lama.

#### Strategi / Tindak Lanjut:

Pertama, melakukan perbaikan perencanaan penarikan anggaran dan jadwal kegiatan. Kedua, dilakukan revisi bagi anggaran yang berpotensi tidak terserap. Ketiga, mematuhi jadwal pertanggungjawaban UP/TUP. Keempat, melakukan revisi hal III DIPA di awal TW IV.

#### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

Pertama, optimalisasi anggaran dilakukan dengan memenuhi ketentuan seleksi penerimaan Awardee Beasiswa angkatan 2023. Kedua, perencanaan penganggaran untuk tahun selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan tren serapan anggaran tahun berjalan sehingga didapatkan luaran kegiatan sebaagi hasil dari pelaksanaan program yang sesuai.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 31 Oktober 2023

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi







# LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2023

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

## 1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi	[IKK 1.1] Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.	orang	9316	<b>TW4</b> : 9316	<b>TW4 :</b> 9951
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB	Predikat	0	<b>TW4:</b> 0	<b>TW4:</b> 0
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Nilai	88	TW4 : 88	<b>TW4 :</b> 87,61

#### 2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

#### a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.9.267.816.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 9.127.136.498** atau **98,48%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 140.679.502** 

## b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

# A . SK 1.0 Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi

- IKK 1.1 Jumlah mahasiswa yang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.

# **Progress / Kegiatan:**

Pelayanan terhadap mahasiswa yang dilayani telah berjalan sejak Januari 2023, terdiri dari mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru hasil seleksi BPI tahun 2023 yang seluruhnya telah ditetapkan pada awal Desember 2023. Proses seleksi untuk BPI dibuka dalam 2 tahap dan berhasil menjaring 3.716 penerima, terdiri dari 2.808 penerima tujuan studi dalam negeri dan 290 penerima tujuan studi luar negeri. Dengan demikian, jumlah mahasiswa yang dilayani pada tahun 2023 total mencapai 9.951 mahasiswa. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 9.316.

# **Kendala / Permasalahan:**

Tidak ada kendala. Proses seleksi dan pelayanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

# Strategi / Tindak Lanjut:

Melakukan percepatan pelayanan administratif dan pembayaran sehingga serapan penyaluran beasiswa sampai akhir tahun dapat dioptimalkan.

# B . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi minimal BB

# **Progress / Kegiatan:**

Pengukuran Kinerja triwulanan telah disampaikan dan diproses di aplikasi SPASIKITA

# Kendala / Permasalahan :

Terdapat kendala tidak adanya fitur ubah dan pembubuhan tanda tangan elektronik pada saat Pengukuran Kinerja TW III di aplikasi SPASIKITA.

# Strategi / Tindak Lanjut:

Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk mendapatkan arahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

# C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi

# **Progress / Kegiatan:**

Serapan anggaran sampai dengan akhir TW IV adalah sebesar 98.48% atau sebesar Rp 9.127.136.498 dari total PAGU anggaran senilai Rp 9.267.816.000. Potensi anggaran gaji PNS yang tidak terserap telah dilakukan revisi untuk kebutuhan operasional perkantoran.



Pembayaran gaji PNS yang semula di satker lama, telah dialihkan pembayarannya ke BPPT. Capaian output untuk dukungan manajemen telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 2 layanan terdiri dari gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Nilai Kinerja Anggaran pada akhir tahun adalah 87.61

## **Kendala / Permasalahan:**

Nilai IKPA belum optimal karena beberapa komponen tidak mencapai nilai maksimal, yaitu untuk nilai serapan anggaran, deviasi hal III, dan pengelolaan UP TUP. Serapan anggaran dan deviasi hal III belum maksimal karena kegiatan belum dijalankan sesuai jadwal sehingga tidak sesuai dengan rencana dan target penarikan yang telah ditetapkan.

#### Strategi / Tindak Lanjut:

Melakukan pengoptimalan serapan anggaran sesuai target triwulan dan penarikan, serta penyelesaian TUP/UP sesuai dengan jadwal yang seharusnya.

### 3. REKOMENDASI PIMPINAN

Perencanaan penganggaran untuk tahun selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan tren serapan anggaran tahun berjalan, terutama pada komponen yang belum optimal pada NKA sehingga didapatkan luaran kegiatan sebagai hasil dari pelaksanaan program yang sesuai.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi



